

Analysis Of Financial Performance At Communication And Informatics Department In Bengkulu Selatan District

Analisis Kinerja Keuangan Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Di Kabupaten Bengkulu Selatan

Noni Lestari ¹⁾; Ahmad Soleh ²⁾; Suswati Nasution ³⁾

¹⁾Study Program of Management, Faculty of Economic, Universitas Dehasen Bengkulu

²⁾ Department of Management, Faculty of Economic, Universitas Dehasen Bengkulu

Email: ¹⁾ nonilestari1197@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received [10 Agustus 2023]

Revised [06 September 2023]

Accepted [07 September 2023]

KEYWORDS

Performance, Finance

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Kinerja instansi pemerintah kini menjadi sorotan dengan semakin tingginya kesadaran masyarakat terhadap penyelenggaraan administrasi publik. Masyarakat sering menilai organisasi sektor publik sebagai sarang inefisiensi, pemborosan, sumber kebocoran dana dan institusi yang selalu merugi. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui Kinerja Keuangan Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Di Kabupaten Bengkulu Selatan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan penelitian secara kuantitatif, pengumpulan data menggunakan pencarian data sekunder, analisis data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kinerja keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2018-2022 berdasarkan rasio derajat desentralisasi masuk katagori sangat rendah. Kemudian berdasarkan rasio ketergantungan keuangan daerah, mengalami tingkat ketergantungan di katagori rendah dari pemerintah pusat dalam pemberian dana transfer. Berdasarkan rasio kemandirian keuangan daerah, mengalami tingkat kemandirian yang sangat kurang. Berdasarkan rasio keserasian yaitu rasio belanja operasi keuangan daerah, mengalami porsi belanja operasi yang cukup rendah disebabkan oleh kurangnya pendapatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Selatan.

ABSTRACT

The performance of government agencies is now in the spotlight with increasing public awareness of the implementation of public administration. Society often views public sector organizations as nests of inefficiency, waste, sources of leakage of funds and institutions that always lose money. The purpose of this study was to determine the financial performance of the Communication and Informatics Service in South Bengkulu Regency. This study uses a quantitative research approach, collecting data using secondary data search, data analysis. The results of this study indicate that the financial performance of the South Bengkulu District Communication and Informatics Service for 2018-2022 based on the degree of decentralization ratio is in the very low category. Then based on the regional financial dependency ratio, experiencing a low level of dependence on the central government in providing transfer funds. Based on the ratio of regional financial independence, experiencing a very low level of independence. Based on the compatibility ratio, namely the ratio of regional financial operating expenditures, experienced a fairly low portion of operating expenditures due to the lack of revenue from the South Bengkulu Regency Communication and Informatics Office.

PENDAHULUAN

Kinerja instansi pemerintah kini menjadi sorotan dengan semakin tingginya kesadaran masyarakat terhadap penyelenggaraan administrasi publik. Masyarakat sering menilai organisasi sektor publik sebagai sarang inefisiensi, pemborosan, sumber kebocoran dana dan institusi yang selalu merugi, Dian (2011: 1).

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah menjadi tonggak dimulainya Otonomi Daerah. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban suatu daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah serta kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan perundang-undangan, Indra dan Gatot (2013: 1). Dalam UU No.32 Tahun 2004 dijelaskan bahwa otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar urusan pemerintah pusat.

Setiap daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta prasarana, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat (Sony, 2015: 50). Termasuk pada pengelolaan keuangan daerah kabupaten dan kota diurus dan diatur sepenuhnya pada Pemerintah Daerah. Oleh sebab itu, dibutuhkan sistem pengelolaan keuangan daerah yang baik dalam mengelola dana desentralisasi secara transparan, ekonomis, efisien, efektif, dan akuntabel yang salah satunya bisa diukur dengan value for money. Value

for money bermanfaat untuk meningkatkan efektivitas pelayanan publik, bertujuan supaya pelayanan yang dibelikan sesuai dengan target, dapat meningkatkan mutu pelayanan publik, menurunkan biaya pelayanan publik agar pemborosan hilang dan terjadi penghematan dalam penggunaan input, alokasi belanja yang lebih mengutamakan kepentingan publik, dan meningkatnya kesadaran akan uang publik (public costs awareness) sebagai akar pelaksanaan akuntabilitas publik. Dengan demikian, diperlukan pengukuran menggunakan value for money. Value for money merupakan inti pengukuran kinerja pada organisasi pemerintah yang berdasarkan pada tiga elemen utama, yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektifitas, Mardiasmo (2009: 127).

Indikator value for money dibagi menjadi dua bagian, yaitu indikator alokasi biaya (ekonomi dan efisiensi) dan indikator kualitas pelayanan (efektivitas). Ekonomi adalah hubungan antara pasar dan masukan (cost of input). Ekonomi merupakan praktik pembelian barang dan jasa input dengan tingkat kualitas tertentu pada harga terbaik yang dimungkinkan (spending less). Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan (cost of output). Produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya (spending well).

Hubungan antara masukan sumber daya oleh suatu organisasi (misalnya: staf, upah, biaya administratif) dan keluaran yang dihasilkan merupakan menggambarkan indikator efisiensi. Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan (spending wisely). Semakin besar kontribusi output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi, Mardiasmo (2009: 132).

Kinerja merupakan gambaran mengenai suatu tingkat untuk mencapai kegiatan, program, kebijakan tertentu dengan tujuan, sasaran, visi, dan misi organisasi yang ada dalam strategi perencanaan organisasi tersebut. Kinerja keuangan organisasi sektor publik dapat dilihat melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

APBD merupakan bentuk pertanggungjawaban untuk mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintah, pembangunan, dan pelayanan sosial masyarakat. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Selatan merupakan salah satu organisasi pemerintah, dalam setiap tahunnya memiliki program/kegiatan yang harus dipertanggungjawabkan kinerjanya. Berikut ini diketahui realisasi program/kegiatan PAPBD pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Selatan.

Dari data yang ada diketahui bahwa kinerja keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Selatan pada tahun 2018 – 2022 mengalami penurunan dan peningkatan pada setiap program. Menurut Mardiasmo pengertian ekonomi adalah pembelian barang atau jasa dengan tingkat kualitas tertentu pada harga terbaik. Apabila terjadinya peningkatan biaya mestinya terkait dengan peningkatan manfaat yang lebih besar.

Selain itu, selama 5 tahun ini (2018 – 2022) terdapat program/kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Selatan yang masih belum mencapai target yang telah ditentukan. Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan. Proses kegiatan operasional dapat dinyatakan efisien apabila hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya.

LANDASAN TEORI

Pengertian Kinerja

Suatu organisasi, baik itu pemerintah maupun swasta, selalu digerakan oleh sekelompok orang yang berperan aktif untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai dari organisasi tersebut. Tujuan organisasi tentunya tidak akan tercapai jika kinerja anggota atau pegawainya tidak maksimal.

Menurut Mangkunegara (2016: 67), kinerja merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan kepadanya.

Pengertian Keuangan

Keuangan adalah mempelajari bagaimana individu, bisnis, dan organisasi meningkatkan, mengalokasi, dan menggunakan sumber daya moneter sejalan dengan waktu, dan juga menghitung risiko dalam menjalankan proyek mereka. Istilah dapat berarti, Ilmu keuangan dan asset lainnya, Manajemen asset tersebut, Menghitung dan mengatur risiko proyek, Ridwan dan Inge (2013: 97).

Kuangan berhubungan dengan proses, lembaga, pasar, dan instrument yang terlibat dalam transfer uang diantara individu maupun antara bisnis dan pemerintah. Keuangan juga bisa didefinisikan sebagai manajemen keuangan, yaitu segala kegiatan perusahaan yang berhubungan dengan cara memperoleh, menggunakan, serta mengelola keuangan perusahaan untuk mencapai tujuan utama perusahaan. Manajemen keuangan merupakan hal yang penting untuk diterapkan pada perusahaan.

Pengertian Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan dalam konteks dunia usaha mengandung pengertian yang sangat luas. Pengertian kinerja keuangan menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2017) adalah kemampuan perusahaan dalam mengelola dan mengendalikan sumber daya yang dimilikinya. Kinerja keuangan merupakan gambaran kondisi keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu menyangkut aspek penghimpunan dana maupun penyaluran dana, yang biasanya diukur dengan indikator kecukupan modal, likuiditas, dan profitabilitas, Jumingan (2016: 239).

Penilaian Kinerja Keuangan

Menurut Sri Miniarti (2011: 34) penilaian kinerja keuangan yaitu penentuan efektivitas operasional, organisasi, dan karyawan berdasarkan sasaran, standar dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya secara periodik. Pengukuran kinerja diaplikasikan perusahaan untuk melaksanakan perbaikan atas kegiatan operasionalnya supaya bisa bersaing dengan perusahaan lain.

Untuk investor, informasi mengenai kinerja keuangan perusahaan dapat digunakan untuk melihat apakah mereka akan mempertahankan investasi mereka di perusahaan tersebut atau mencari alternatif lain. Apabila kinerja perusahaan baik maka nilai usaha akan tinggi. Dengan nilai usaha yang tinggi membuat para investor melihat perusahaan tersebut untuk menanamkan modalnya sehingga akan terjadi kenaikan harga saham atau dapat dikatakan bahwa harga saham merupakan fungsi dari nilai perusahaan.

Indikator Kinerja Keuangan

Dengan demikian setiap Pemerintah Daerah untuk mengukur Kinerja Keuangan Daerahnya menggunakan beberapa indikator Rasio Kinerja Keuangan Daerah yang antara lain : Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, dan Rasio Keserasian.

a. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Total Pendapatan Daerah. Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap Total Pendapatan Daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi. Derajat Desentralisasi Fiskal, khususnya komponen PAD dibandingkan dengan Total Pendapatan Daerah, menurut hasil penelitian Tim Fisipol UGM menggunakan skala interval seperti pada tabel berikut :

b. Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan keuangan daerah yaitu rasio yang mengukur tingkat kemampuan daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Semakin tinggi rasio yang dihasilkan maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dan atau pemerintah provinsi.

c. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah ditunjukkan oleh besarnya Pendapatan Asli Daerah dibandingkan dengan Pendapatan Daerah yang berasal dari sumber lain (Pendapatan Transfer) antara lain : Bagi hasil pajak, Bagi hasil bukan pajak sumber daya alam, Dana alokasi umum dan Alokasi khusus, Dana darurat dan pinjaman, Widodo (2017: 262).

d. Rasio Keserasian

Rasio Keserasian menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada Belanja Operasi dan Belanja Modal secara optimal. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk Belanja Operasi berarti persentase Belanja Modal yang digunakan untuk menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil. Secara sederhana, Rasio Keserasian itu dapat diformulasikan sebagai berikut, Abdul Halim (2012: 234):

e. Rasio Efisiensi Belanja Keuangan Daerah

Rasio Efisiensi Belanja Keuangan Daerah menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja Keuangan Pemerintahan Daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien

apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau di bawah 100%. Semakin kecil Rasio Efisiensi Keuangan Daerah berarti Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah semakin baik..

METODE PENELITIAN

Metode Analisis

Penulis menggunakan metode pendekatan penelitian secara kuantitatif. Metode kuantitatif adalah metode penelitian yang dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi pada sample tertentu. Pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan menguji hipotesis yang telah ditetapkan, Arikunto, (2014: 174).

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yaitu peneliti yang dilakukan dalam ranah kehidupan yang sebenarnya. Menurut sudut tujuan bidangnya penelitian ini masuk dalam katagori penelitian ekonomi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Data yang dikumpulkan berupa arsip dokumen pada bagian Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika yang berupa data Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pendapatan dan Belanja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2018-2022.

Derajat Desentralisasi

Saat ini upaya yang dilakukan Dinas Komunikasi dan Infomatika Kabupaten Bengkulu Selatan Untuk menaikkan derajat desentralisasi keuangan dengan berpedoman pada penetapan UU Nomor 1 tahun 2022 tentang HKPD sebagai upaya untuk mempertajam pelaksanaan desentralisasi fiskal. UU HKPD akan mendorong pemda dalam melakukan optimalisasi penerimaan daerah dan men-direct pemda dalam meningkatkan kualitas belanja daerah. Selain itu, pemerintah mencoba memastikan agar seluruh APBD dapat dilaksanakan menuju arah yang sama dalam mencapai tujuan nasional. Dengan demikian harapannya semua warga negara dapat merasakan dan menikmati layanan publik yang berkualitas di seluruh wilayah republik Indonesia.

Persentase tingkat derajat desentraliasi dari tahun 2018- 2022, dengan rata-rata derajat desentralisasi yaitu 16,2%. Persentase tingkat derajat desentraliasi terkecil terdapat pada tahun 2021 yaitu 14,9% sedangkan persentase tingkat derajat desentralisasi terbesar terdapat pada tahun 2017 yaitu 17,8 %. Apabila dilihat dari tahun 2018-2022 Derajat desentralisasi keuangan Dinas Komunikasi Dan Informatika kabupaten Bengkulu Selatan masuk dalam kategori sangat rendah.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Selatan termasuk belum mampu menyelenggarakan desentralisasi karena nilai rata-rata yang masih dalam kategori sangat rendah (skala 0%-25%). Artinya Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Selatan belum mampu menyelenggarakan desentralisasi dengan mengoptimalkan potensi daerah untuk menyelenggarakan pelayanan umum yang lebih baik sebab rata-rata rasio derajat desentralisasi hanya mencapai 16,2%. Pada penelitian yang dilakukan oleh Sri Wahyuni (2008) di Sragen dijelaskan bahwa Kinerja Keuangan Kabupaten Sragen tahun 2002-2006 jika dilihat dari Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal ini masih tergolong Sangat Kurang karena rata-rata rasionya sebesar 9,69%. Hal tersebut kurang lebih hampir sama dengan apa yang terjadi di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Selatan dimana rata-rata kinerja keuangannya sebesar 16,2% dan tergolong sangat kurang meskipun hal tersebut tidak dapat dijadikan perbandingan karena perbedaan tahun penelitiannya.

Menurut Sri Wahyuni permasalahan yang terjadi di Pemerintah Kabupaten Sragen adalah ketidakmampuan pemerintah daerah yang bersangkutan untuk menggali potensi-potensi daerah yang ada guna meningkatkan PAD dan ketergantungan yang masih sangat besar terhadap bantuan ataupun pinjaman dari pemerintah pusat. Begitupun juga yang terjadi di Kabupaten Blora dimana peneliti menyimpulkan bahwa ketidakmampuan pemerintah daerah untuk menggali potensi-potensi yang ada menyebabkan kinerja keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Selatan dilihat dari Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal masih tergolong sangat kurang.

Rasio Ketergantungan

Pada Tabel 6. menunjukan bahwa PAD Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Selatan dari tahun 2018 sampai dengan 2022 mengalami penurunan dan kenaikan. Pada tahun 2018 PAD Kabupaten Blora sebesar 2,72% dari total pendapatan. Mengalami penurunan pada tahun 2019 yaitu menjadi 2,86% dari total pendapatan. Pada tahun 2020 PAD Dinas Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Bengkulu Selatan mengalami kenaikan menjadi 2,82% dari total pendapatan. Pada tahun 2021 mengalami penurunan yaitu menjadi 2,87% dari total pendapatan. Kemudian pada tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 2,57% dari total pendapatan.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Selatan memiliki tingkat ketergantungan dalam kategori rendah (skala 0%-25%). Hal ini disebabkan masih rendahnya kontribusi pendapatan asli daerah dibandingkan pendapatan transfer. Artinya Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Selatan masih bergantung kepada pemerintah pusat dengan rata-rata rasio ketergantungan sebesar 2,76%

Pada penelitian yang dilakukan oleh Hony Adhiantoko (2013) Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Belora pada tahun 2007-2011 jika dilihat dari Rasio Kemandirian tergolong rendah sekali atau Instruktif. Rata-rata rasionya sebesar 4,95%. Hal tersebut juga terjadi di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Selatan pada penelitian ini dimana rata-rata rasionya sebesar 2,76% dan Kinerja Keuangannya tergolong Instruktif. Menurut Hony Adhiantoko penyebab terjadinya kinerja keuangan yang rendah sekali tersebut hamper sama apa yang dijelaskan pada penelitian ini dimana kedua daerah ini masih mengandalkan bantuan dari pemerintah baik pusat maupun provinsi dan belum mampu untuk mengolah potensi yang mereka miliki sendiri guna menaikkan PAD.

Rasio Kemandirian

Dari hasil perhitungan tingkat kemandirian. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Selatan masih dalam kategori kurang dengan pola hubungan Instruktif untuk tahun 2018-2022 (skala 0%-25%) dan pola hubungan konsultatif, yang berarti Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Selatan belum mandiri sebab peranan pemerintah pusat masih lebih dominan. sehingga Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Selatan tidak dapat melaksanakan otonomi daerah secara finansial dan pemerintah kabupaten Bengkulu Selatan belum cukup mampu untuk membiayai sendiri kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Selatan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Namun untuk tetap mempertahankan hal tersebut, Pemerintah Daerah harus terus mengoptimalkan penerimaan dari potensi pendapatannya yang telah ada. Inisiatif dan kemauan Pemerintah Daerah sangat diperlukan dalam upaya peningkatan PAD. Pemerintah Daerah harus mencari alternatif-alternatif yang memungkinkan untuk dapat mengatasi kekurangan pembiayaannya, dan hal ini memerlukan kreatifitas dari aparat pelaksanaan keuangan daerah untuk mencari sumber-sumber pembiayaan baru baik melalui program kerjasama pembiayaan dengan pihak swasta dan juga program peningkatan PAD, misalnya pendirian BUMD sektor potensial.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Fitriyah Agustin (2007) yang melakukan penelitian di Kabupaten Blitar dijelaskan bahwa kinerja keuangan Blitar jika dilihat dari Rasio kemandirian masih bergantung kepada pemerintah pusat. Begitupun juga dalam penelitian ini dimana kinerja keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Selatan rasio kemandiriannya masih bergantung kepada pemerintah pusat dikarenakan pemerintah daerah tidak dapat memenuhi kebutuhan dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Selatan.

Rasio Keserasian

a. Rasio Belanja Operasi

Artinya porsi belanja operasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Selatan masih cukup tinggi dengan rata-rata 2,63%. Hal ini disebabkan oleh sedikitnya pendapatan Dinas Komunikasi dan Informatika.

b. Rasio Belanja Modal

Porsi belanja modal pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Selatan cukup rendah dengan rata-rata 4,98%. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Selatan juga memiliki upaya untuk terus mengupayakan pembangunan.

Menurut uraian dan perhitungan di atas bahwa sebagian besar dana yang dimiliki Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Selatan masih diprioritaskan untuk kebutuhan belanja operasi sehingga rasio belanja modal relatif kecil. Ini dapat dibuktikan dari rata-rata rasio belanja operasi yang masih besar dibandingkan dengan rata-rata rasio belanja modal. Besarnya alokasi dana untuk belanja operasi terutama dikarenakan besarnya dinas-dinas otonomi dan belanja pegawai untuk gaji PNS. Dengan ini dapat menunjukkan bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Selatan yang lebih condong pada pengeluaran-pengeluaran rutin untuk pemenuhan aktivitas Pemerintahan dan belum memperhatikan pembangunan daerah. Hal ini dikarenakan belum ada patokan yang pasti untuk belanja modal, sehingga Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Selatan masih berkonsentrasi pada pemenuhan belanja operasi yang mengakibatkan belanja modal

untuk Pemerintah Kabupaten Blora kecil atau belum terpenuhi. Untuk itu kedepannya Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Selatan diharapkan lebih memperhatikan pelayanan kepada masyarakat yang nantinya dapat dinikmati langsung oleh publik. Karena pada dasarnya dana pada anggaran daerah adalah dana publik sehingga dana tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan publik.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Sri Wahyuni (2008) dijelaskan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Sragen jika dilihat dari Rasio Keserasian masih kurang stabil Karena selalu terjadi kenaikan maupun penurunan di tiap-tiap periode. Hal tersebut hampir sama apa yang terjadi pada penelitian ini dimana Kinerja Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Selatan jika dilihat dari Rasio Keserasian masih tidak stabil.

Rasio Efisiensi Belanja

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Selatan sempat mengalami tingkat efisiensi belanja yang kurang efisien pada tahun 2020 (skala 0%-25%), Artinya tingkat efisiensi belanja semakin buruk. Hal itu terjadi karena realisasi pendapatannya lebih kecil daripada realisasi belanja belanja yang di anggarkan. Sehingga total anggaran belanja melebihi total Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Selatan.

Rata-rata Efisiensi Belanja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Selatan yang tergolong masih Kurang Efisien karena rata-rata rasionya 14% diakibatkan karena total belanja daerahnya masih lebih besar daripada pendapatan daerahnya terutama pada tahun 2019. Meskipun pada tahun 2019 tersebut Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Selatan sudah dapat menekan belanjanya daripada yang dianggarkan sebelumnya namun jumlah pendapatan yang diperolehnya masih sedikit jumlahnya bila dibandingkan dengan belanja daerahnya. Sehingga dapat dikatakan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Selatan dalam hal ini masih buruk karena belum dapat menekan jumlah belanja daerahnya. Untuk kedepannya diharapkan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Selatan dapat meminimalisir jumlah belanjanya dengan disesuaikan pendapatannya. Sehingga kedepannya dapat terjadi peningkatan efisiensi belanja daerah.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Andi Melisa Anastasia. B (2012) di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan Kinerja keuangannya jika dilihat dari Rasio Efisiensi belanja Daerah belum Efisien karena rata-ratanya sebesar 14%. Menurut peneliti hal tersebut terjadi karena Pemerintah Kabupaten Bulukumba belum berhasil menerapkan efisiensi anggarannya. Hal ini sama dengan apa yang terjadi dalam penelitian ini dimana efisiensi keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Selatan Tidak Efisien.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Anis karlina dan Nurhandayani dengan hasil analisis menunjukkan yang bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah dalam pengelolaan anggaran pendapatan daerah kota surabaya secara umum dikatakan kurang baik dalam varians pendapatan. Hal ini dibuktikan (a) varians pendapatan daerah rata-rata di bawah 25%, (b) rasio keuangan daerah dilihat derajat desentralisasi menunjukkan rata-rata 53,54%, rasio kemanirian keuangandaerah rata-rata 176,05%, rasio pertumbuhan pendapatan daerah rata-rata positif, 2) kinerja keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Selatan dalam pengelolaan anggaran belanja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Selatan secara umum dapat sangat buruk. Hal ini dibuktikan (a) varians belanja daerah rata-rata di bawah 25%, (b) keserasian belanja daerah dilihat dari rata-rata belanja modal 4,89% dan rata-rata belanja operasional 2,63%, (c) efesiensi belanja daerah rata-rata dibawah 25% yakni 3,76%, (b) pertumbuhan belanja daerah mengalami pertumbuhan rata-rata 7,52%, (c) keserasian belanja daerah dapat dikatakan bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Selatan mengalokasikan sebagian besar anggaran belanjanya untuk belanja operasi rata-rata 2,63% dibandingkan dengan belanja modal rata-rata 4,89%, (d) efisiensi belanja daerah menunjukkan rata-rata di bawah 25%.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang ada maka penulis menyimpulkan bahwa :

1. Kinerja keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2018-2022 berdasarkan rasio derajat desentralisasi masuk katagori sangat rendah. Itu artinya Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Selatan belum baik dalam menyelenggarakan pelayanan umum. Berdasarkan rasio ketergantungan keuangan daerah, mengalami tingkat ketergantungan di katagori rendah dari pemerintah pusat dalam pemberian dana transfer.

2. Berdasarkan rasio kemandirian keuangan daerah, mengalami tingkat kemandirian yang sangat kurang. Kinerja keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2018-2022.
3. Berdasarkan rasio keserasian yaitu rasio belanja operasi keuangan daerah, mengalami porsi belanja operasi yang cukup rendah disebabkan oleh kurangnya pendapatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Selatan.
4. Untuk rasio belanja modal keuangan daerah, porsi belanja operasi pada pemerintah daerah cukup kecil dan dapat dikatakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Selatan masih kurang memperhatikan pembangunan-pembangunan di daerah.
5. Kinerja keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2018-2022 berdasarkan rasio keserasian yaitu rasio belanja modal keuangan daerah, mengalami penurunan dan porsi belanja modal yang cukup kecil. Kinerja keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2018-2022 berdasarkan rasio efisiensi belanja keuangan daerah, mengalami fluktuasi setiap tahunnya.

Saran

1. Sebaiknya Dinas Komunikasi dan Informatika perlu meningkatkan kinerja atau manajemen atas untuk meningkatkan atau mencapai target yang harus di capai dalam sebuah instansi.
2. Pegawai perlu menciptakan hubungan kerja yang baik dan kondusif, baik antarsesama pegawai maupun antara pegawai dengan manajemen di atasnya dan perlu memperhatikan kinerja karyawan terutama dalam hal administrasi serta dalam hal efisiensi waktu kerja.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. 2012. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Edisi Ketiga. Yogyakarta : UPP STIM YKPN.
- Agnes Sawir, 2015, *Analisis Kinerja Keuangan dan Perencanaan Keuangan Perusahaan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Annisa, Dian, 2011, "Evaluasi Kinerja Keuangan Dinas Kesehatan Kota Makasar Melalui Pendekatan Value For Money". Skripsi--Universitas Hasanuddin.
- Arikunto, Suharsimi, 2014. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Fadel, Muhammad. 2014. *Reiventing Local Govemment*. PT. Elex Media Komputindo. Jakarta
- Fahmi, Irham. 2014. *Analisa Kinerja Keuangan*. Bandung : Alfabeta
- Hanafi, Mamduh M. 2016. *Analisis Laporan Keuangan*. Edisi Kelima. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Harahap, Sofyan Syafri. 2011. *Analisa Kritis Atas Laporan Keuangan*, Grafindo Persana. Jakarta.
- Indra Bastian dan Gatot Soepriyanto, 2003, *Sistem Akuntansi Sektor Publik: Konsep untuk Pemerintahan Daerah* (Jakarta: Salemba Empat)
- Jumingan, 2014, *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta : PT. Bumi Aksara.
- Mangkunegara, 2016. *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*, Cetakan keenam. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Mardiasmo, 2009, *Akuntansi Sektor Publik* (Yogyakarta: CV Andi Offset)
- Minarti,Sri, 2011, *Manajemen Sekolah: Mengelola Lembaga Pendidikan Secara Mandiri*, Yogyakarta: AR-RUZZ Media
- Mulyadi. 2016. *Sistem Informasi Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Munawir, 2014. *Analisa Laporan Keuangan*.Yogyakarta: Liberty
- Ridwan S., Inge Barlian, dan Dharma Putra Sundjaja, 2010, *Manajemen Keuangan 2*.Edisi 6. Literata Lintas Media.
- Ridwan,Mohamad. 2012, *Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata*. PT SOFMEDIA: Medan
- Rudianto, 2012, *Pengantar Akuntansi Konsep & Teknik Penyusunan Laporan Keuangan*, Penerbit : Erlangga, Jakarta
- Sigit Pastyo, 2014. *Pengaruh gaya kepemimpinan dan kompensasi terhadap Kinerja pegawai dengan kepuasan kerja sebagai Variabel intervening*. Program studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.
- Sony Yuwono, 2005, *Penganggaran Sektor Publik* (Malang: Bayumedia Publishing)
- Stephen, Robbins (2015), *Perilaku Organisasi*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Sugiyono, 2012. *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabetta, CV.
- Sujarweni, V. Wiratna. 2015. *Metodologi Penelitian--Bisnis & Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press
- Sutrisno, Edy. 2012. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Edisi 1. Cetakan Keempat. Jakarta: Prenada Media Group.
- Widodo. 2017. *Metodologi Penelitian Populer & Praktis*. Jakarta: Rajawali Pers.

Wild, Subramanyam, dan Halsey. 2005. Analisis Laporan Keuangan. Edisi Kedelapan. Diterjemahkan oleh: Yanivi S. Bachtiar dan S. Nurwahyu Harahap. Salemba Empat. Jakarta.